

LAKIP

LAPORAN KINERJA

2021



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau disebut juga Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), yang merupakan perjalanan tahun kedua dari Renstra Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Badan Pengusahaan Batam menjelaskan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam pada Tahun 2021, tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2021, sekaligus merupakan laporan kinerja Badan Pengusahaan Batam yang merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Badan Pengusahaan Batam ini kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Pengusahaan Batam di masa yang akan datang.



LAPORAN KINERJA BP BATAM TAHUN 2021

Kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini masih terdapat kekurangan yang akan diperbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh unit kerja yang ada di Badan Pengusahaan Batam.

Batam, Januari 2022

Ttd,



Kepala BP Batam

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah direncanakan. Capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Beberapa capaian utama kinerja Badan Pengusahaan Batam pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA BP BATAM TAHUN 2021

Visi	Misi	T U	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	Capaian (%)
BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1) Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif	Meningkatkan investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam	1.1 Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1.1.1 Realisasi Investasi di Batam	Rp 25.000.000.000.000	Rp 14.880.794.320.000,-	59,52
	2) Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif		2.1 Kinerja Pendapatan	2.1.1 Realisasi Jumlah PNPB	Rp 1.670.000.000.000	Rp 1.423.077.691.809	85,21
	3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		3.1 Pengembangan Sistem Informasi BLU	3.1.1 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	125%	125
	4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		4.1 Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	4.1.1 Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	≥ 85,00 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	83,86 (Skala 1-100) (Predikat baik)	98,66
	5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan		5.1 Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	5.1.1 Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi	Predikat WBK 2 (Dua) Unit Kerja	70,00%	70,00
	6) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		6.1 Kinerja Pelayanan Perijinan	6.1.1 Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan	100%	65,03%	65,03
				6.1.2 Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang	100%	95,48%	96,46
			7.1 Inovasi Pelayanan	7.1.1 Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM, dan Lingkungan	100%	100,00%	100
Rata-Rata							87,49

Tabel Alur –Visi Misi – Realisasi Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 7 (tujuh) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja utama, dengan capaian sasaran sebesar 87,36%.

Kategori pencapaian sasaran tahun 2021 cukup sesuai dengan yang diharapkan, tetapi ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran, antara lain:

- a. Hambatan eksternal yang dominan dan sangat mempengaruhi capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan yaitu masih kurang optimalnya koordinasi antarlembaga.
- b. Hambatan internal yang cukup mempengaruhi capaian kinerja adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum optimal.

Berbagai permasalahan atau kendala tersebut diatas diusahakan untuk diatasi agar tidak menghambat pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan:

- a. Penyelesaian peraturan dan ketentuan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas BP Batam;
- b. Tata kelola kompetensi sumber daya manusia khususnya, kualifikasi yang dibutuhkan belum sesuai dengan yang diberikan; dan
- c. Perlunya inovasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP Batam.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan guna pencapaian sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik, namun demikian, kami tetap berupaya agar laporan ini dapat memenuhi tujuan penyusunannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam	2
C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam	5
D. Tugas Pokok dan Fungsi	6
E. Struktur Organisasi	8
F. Organisasi Pembina dan Asistensi	10
G. Unit Usaha dan Kegiatan Utama.....	11
H. Sumber Daya Manusia.....	17
I. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh	18
BAB II.....	19
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis.....	19
A.1. Visi	20
A.2. Misi.....	20
A.3. Tujuan.....	22
A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	22
A.5. Strategi dan Arah Kebijakan	23
A.6. Program	26
A.7. Rencana Kinerja	27
B. Perjanjian Kinerja	32
BAB III.....	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama	33
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	33
C. Akuntabilitas Keuangan.....	44
BAB IV.....	48



PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
LAMPIRAN	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BP Batam	9
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah SDM BP Batam	17
Tabel 1.2 Analisis SWOT	18
Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam	23
Tabel 2.2. Alur Visi-Misi BP Batam 2021	25
Tabel 2.3. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU	31
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	32
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran ke-1	34
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2	34
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran Ke-3	35
Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4	37
Tabel 3.4.1 Kriteria Penentuan Nilai SKM	37
Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran ke-5	38
Tabel 3.6. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6	39
Tabel 3.7. Indikator Kinerja Sasaran ke-6	40
Tabel 3.8. Indikator Kinerja Sasaran ke-6	41
Tabel 3.9. Indikator Kinerja Sasaran ke-7	42
Tabel 3.10. Indikator Kinerja Sasaran ke-7	42
Tabel 3.11. Capaian IKU Tahun 2021.....	44
Tabel 3.12. Target dan Realisasi Penerimaan PNBK Tahun 2021.....	45
Tabel 3.13. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021.....	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pulau Batam merupakan salah satu pulau di antara 329 pulau dalam gugusan Kepulauan Riau, yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura. Langkanya catatan tertulis dari pulau ini, maka hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada tahun 1970-an, Pulau Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau disingkat dengan Otorita Batam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 62 tersebut ditandatangani atau diberlakukan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Pulau Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha, khususnya penanaman modal asing dari berbagai negara, yang mampu menampung tenaga kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat.

Hal ini tidak lain karena semakin tumbuhnya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari masalah. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan institusi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program organisasi agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kinerja organisasi, serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu strategis juga merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka Badan Pengusahaan Batam akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Untuk mendukung instrumen kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berdaya saing untuk meningkatkan nilai investasi adalah pengaturan dalam pelayanan, khususnya yang di bawah naungan pengelolaan BP Batam.

Beberapa aspirasi dari masyarakat (*stakeholders*) yang dianggap mampu menjadi daya ungkit Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu:

1. Pelayanan perijinan terpadu dalam satu tempat bernama Mall Pelayanan Publik sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan akurat;
2. Penerapan OSS (*Online Single Submission*) bagi kemudahan dalam investasi di KPBPB Batam;

3. BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diharapkan segera mengoptimalkan fungsi kepelabuhanan untuk pemanfaatan kapasitas yang tersedia;
4. Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung iklim investasi dan daya dukung kehidupan masyarakat;
5. Profesionalisme pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*stake holder*) yang berlandaskan atas prinsip efektif, efisien dan transparan.

Sedangkan beberapa isu strategis Badan Pengusahaan Batam yang perlu diatasi dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, antara lain

1. Peraturan Perundangan UU 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang belum dilengkapi dengan peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam peraturan teknis antara lain adalah masalah pelimpahan wewenang perizinan, pembiayaan pembangunan, pembagian pendapatan, pertanahan, dll. Salah satu pelayanan yang diinginkan oleh calon investor dari pengelola kawasan adalah kemudahan dalam memperoleh berbagai izin yang disyaratkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang umumnya dalam bentuk pelayanan satu atap di dalam Mall Pelayanan Publik. Lama pengurusan dan biaya, serta prosedur permintaan izin-izin harus ditetapkan dalam peraturan tersebut. Pengembangan dan pengoperasian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga akan menyangkut kepentingan dan urusan tingkat daerah, seperti masalah tata ruang, penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana, dll. Untuk itu perlu dibuat beberapa peraturan daerah yang mengatur kerjasama kedua lembaga.

- 2 Pengembangan infrastruktur. Untuk menunjang kegiatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka infrastruktur harus dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur juga melingkupi pengembangan sistem dan prosedur yang memberi kemudahan bagi investor Insentif. Insentif yang menarik diperlukan untuk mendatangkan investor. Adanya investasi asing diharapkan akan membuka lapangan kerja, meningkatkan penguasaan

teknologi dan manajemen usaha, mendorong tumbuhnya industri pendukung, dan mendatangkan devisa dari kegiatan ekspor yang dilakukan.

- 4 Tata kelola. Untuk dapat bersaing dengan FTZ lain maka pengelolaan perlu dilakukan secara profesional dengan praktek manajemen standar internasional. Dalam kaitan ini, Badan Pengusahaan Batam dapat membangun suatu pola kerjasama yang sifatnya mutualistik dengan kawasan sejenis di ASEAN. Selain itu, perlu secara seksama memanfaatkan kerjasama ekonomi sub-regional yang telah dikembangkan selama ini, khususnya dalam konteks IMS-GT dan IMT-GT, dengan membuka kerjasama dan hubungan bisnis yang intensif dengan kawasan sejenis di berbagai negara.
- 5 Ketenagakerjaan. Investor yang beroperasi di Batam akan memerlukan tenaga terampil dalam jumlah banyak. Apalagi seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal 2016, yang memungkinkan tenaga kerja asing mengisi posisi pada bidang-bidang tertentu, maka hal ini perlu diantisipasi. Pada saat ini tenaga terampil tersebut masih belum mencukupi. Untuk itu agar kekurangan tenaga terampil itu tidak diisi oleh pendatang dari luar Batam atau luar negeri, maka sejak dini generasi muda di Kawasan Batam perlu disiapkan untuk menjadi tenaga- tenaga terampil yang siap dipekerjakan. Pengusaha lokal juga perlu disiapkan untuk dapat menjadi penyalur bahan pangan dan industri bagi perusahaan industri pengolahan dari luar yang akan menjalankan usahanya di Kawasan Batam.
- 6 Kelembagaan. Perlu dilakukan pengaturan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, BP Batam dengan Pemko Batam agar pembangunan Kawasan Batam tidak mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain masalah pertanahan, perizinan, pengelolaan, pembiayaan, tata ruang dan lingkungan, dll. Pola hubungan kerjasama antara Pemko Batam dengan BP Batam juga perlu dikaji secara mendalam, sehingga dapat terjadi suatu pola kemitraan yang sinergis antar kedua lembaga. Kejelasan terhadap kewenangan, khususnya antara kewenangan Pusat yang diemban oleh BP Batam dan kewenangan Pemko Batam, perlu ditetapkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dan perusahaan kawasan Batam di masa mendatang.

C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun.

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Wilayah kerja KPBPB ditambah dengan Pulau Janda Berhias dan gugusannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Penetapan Batam sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007, maka kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi ***Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*** atau disingkat dengan ***Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)***.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dijalankan oleh BP Batam, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan/peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 11 september 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- b. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis;

- c. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan kawasan dan investasi;
- d. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengusaha;
- e. Pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam;
- f. Pengelolaan lahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun; dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan:

- a. Membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- b. Mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Membuat peraturan di bidang tata tertib pelayanan dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain, yang meliputi:
 - 1) Pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga mampu bersaing dengan Kawasan sejenis di negara lain.
 - 2) Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor industri, maritim, perdagangan, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya;
 - 3) Memproses Perizinan Usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam dan melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam.
- e. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk tugas-tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam, kecuali terhadap

tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dewan Kawasan menetapkan organisasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, berdasarkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam dibantu oleh 4 anggota yang mempunyai tugas sesuai bidangnya, yaitu

1. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan;
2. Anggota Bidang Kebijakan Strategis;
3. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi;
4. Anggota Bidang Pengusahaan.

Peraturan Dewan Kawasan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

F. Organisasi Pembina dan Asistensi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 29 Februari 2016, penetapan kebijakan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Badan Pengusahaan Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya terdiri dari:

- Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Gubernur Kepulauan Riau;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Walikota Batam.

Pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam tidak lepas dari peran Dewan Kawasan yang memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan kepada BP Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam;
- c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Badan Pengusahaan Batam mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kawasan dapat membentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis. Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

G. Unit Usaha dan Kegiatan Utama

Jumlah unit kerja sesuai struktur organisasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, terdiri dari:

- a. Unit Kerja yang menghasilkan PNBP dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung sebanyak 11 Unit Kerja, yaitu sebagai berikut:
 1. Badan Usaha Pelabuhan, memiliki 5 (lima) jenis layanan yaitu:
 - 1) Pelayanan Keluar Masuk Kapal;
 - 2) Pelayanan Barang;

- 3) Pelayanan Penumpang yang terdiri dari pas penumpang di terminal penumpang;
 - 4) Pelayanan Jasa Alat;
 - 5) Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya.
2. Direktorat Pengelolaan Lahan, memiliki 8 (delapan) jenis layanan meliputi:
- 1) Pelayanan Ijin Alokasi Lahan;
 - 2) Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lahan;
 - 3) Pelayanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL);
 - 4) Pelayanan Legalisasi Dokumen Lahan;
 - 5) Pelayanan Pecah dan Penggabungan Penetapan Lokasi;
 - 6) Pelayanan Ijin Peralihan Hak;
 - 7) Pelayanan Penggantian Dokumen;
 - 8) Pelayanan Perpanjangan UWTO.
3. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi, memiliki 9 (sembilan) jenis layanan diantaranya:
- 1) Pelayanan Jasa Penerbangan;
 - 2) Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara;
 - 3) Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara;
 - 4) Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (*aviobridge*);
 - 5) Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (*Check in Counter*);
 - 6) Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang Lini 1;
 - 7) Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Diluar Jam Operasi;
 - 8) Pelayanan Jasa Sewa dan Tanda Masuk Kawasan Terbatas Bandar Udara (*Pas*);
 - 9) Data Center;
 - 10) Training Center.
4. Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam, yang terbagi dalam 21 (dua puluh satu) jenis layanan meliputi:
- 1) Pelayanan Gawat Darurat;
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan;
 - 3) Pelayanan Rawat Inap;

- 4) Pelayanan Bedah Sentral;
 - 5) Pelayanan Persalinan Dan Perinatology;
 - 6) Pelayanan Intensif (PI);
 - 7) Pelayanan Radiologi;
 - 8) Pelayanan Laboratorium;
 - 9) Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - 10) Pelayanan Farmasi;
 - 11) Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi;
 - 12) Pelayanan Gakin;
 - 13) Pelayanan Ambulance/Kereta Jenasah;
 - 14) Pelayanan Pemulasaran Jenasah;
 - 15) Pelayanan Gizi;
 - 16) Pelayanan Transfuse Darah;
 - 17) Pelayanan Rekam Medik;
 - 18) Pelayanan Pengelolaan Limbah;
 - 19) Pelayanan Administrasi Dan Manajemen;
 - 20) Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - 21) Pelayanan Laundry.
5. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, memiliki 16 (enam belas) jenis layanan meliputi:
- 1) Pelayanan Rekomendasi Sambungan Air Bersih;
 - 2) Pelayanan Jasa Pengurusan *Septic Tank* (Sumur Tinja);
 - 3) Pelayanan Jasa Pengolahan Limbah Domestik;
 - 4) Pelayanan Izin Pengelola Pembuangan Limbah ke IPAL Domestik;
 - 5) Pelayanan Izin Jasa Rekanan (Tanda Daftar Rekanan) Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil;
 - 6) Pelayanan Sewa Gudang Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - 7) Pelayanan Sewa Lahan KPLI - B3 Kabil;
 - 8) Pelayanan Penyediaan Bibit Pohon Penghijauan;
 - 9) Pelayanan Jasa Persetujuan Ijin Pematangan Lahan;
 - 10) Pelayanan Izin Pemangkasan Pohon Penghijauan dan Izin Penggalian Lokasi

Taman dan *Land Clearing*;

- 11) Pelayanan Jasa Mini Garden dan Dekorasi;
 - 12) Pelayanan Izin Penggunaan Sementara Bagian ROW/*Buffer*;
 - 13) Pelayanan Sewa Kamar Rumah Susun;
 - 14) Pelayanan Pemanfaatan Kandang dan Tapak Kandang Sapi dan Kambing;
 - 15) Pelayanan Jasa Pemotongan Sapi dan Kambing;
 - 16) Pelayanan Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian dan Perikanan.
6. Biro Keuangan, memiliki 2 (dua) jenis layanan, yaitu:
 - 1) Administrasi Keuangan;
 - 2) Layanan Rencana Program Kerja Anggaran dan Revisi Anggaran.
 7. Direktorat Infrastruktur Kawasan, memiliki 2 (dua) jenis layanan meliputi:
 - 1) Pelayanan Ijin Penempatan Reklame;
 - 2) Laboratorium Uji Tanah.
 8. Kantor Perwakilan Jakarta, memiliki layanan penginapan yaitu Kuningan Guest House.
 9. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, memiliki 19 (sembilan belas) jenis layanan meliputi:
 - 1) Pelayanan Izin Usaha (Registrasi Usaha);
 - 2) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu;
 - 3) Pelayanan Izin Pemasukan Barang dan Barang Modal Bukan Baru;
 - 4) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol;
 - 5) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor;
 - 6) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Alat Pertanian;
 - 7) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Produsen Plastik;
 - 8) Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal;
 - 9) Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 - 10) Pelayanan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
 - 11) Pelayanan Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal;
 - 12) Pelayanan Perubahan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 13) Pelayanan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal;
 - 14) Pelayanan Izin Usaha Penanaman Modal;

- 15) Pelayanan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - 16) Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger);
 - 17) Pelayanan Pembatalan Pendaftaran / Persetujuan Penanaman Modal;
 - 18) Pelayanan Pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 19) Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir.
10. Pusat Perencanaan Program Strategis, memiliki Pelayanan Jasa Persetujuan Izin Fatwa Planologi.
11. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, memiliki 2 (dua) jenis layanan meliputi:
- 1) Layanan pengelolaan pendistribusian, penanganan tingkat kehilangan air dan layanan pelanggan;
 - 2) Layanan pemasaran dan pengembangan usaha sistem pengelolaan air minum hilir.
- b. Unit Kerja Layanan Pendukung yang memberikan layanan internal BP Batam sebanyak 13 (tiga belas) Unit Kerja, dengan rincian sebagai berikut:
1. Biro Umum, memiliki 2 (dua) jenis layanan terdiri dari:
 - 1) Pelayanan Kerumahtanggaan Internal BP Batam;
 - 2) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Biro Sumber Daya Manusia, memiliki Layanan Kepegawaian BP Batam.
 3. Biro Hukum dan Organisasi, memiliki Layanan Bantuan Hukum.
 4. Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, memiliki 3 (tiga) jenis layanan yaitu:
 - 1) Penelitian dan Sinkronisasi Kebijakan;
 - 2) Pelayanan Pentarifan;
 - 3) Pelayanan Manajemen Kinerja Organisasi.
 5. Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK, memiliki 3 (tiga) jenis layanan yang terdiri dari:
 - 1) Pelayanan kajian pengembangan dan kerjasama usaha;
 - 2) Pelayanan fasilitas kemudahan berusaha di KPBPB Batam;
 - 3) Pelayanan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di KPBPB Batam.
 6. Biro Humas, Promosi dan Protokol, memiliki Layanan Kehumasan, Promosi dan

Protokol BP Batam.

7. Direktorat Pengamanan Aset, memiliki 2 (dua) jenis layanan yaitu:
 - 1) Layanan Pemadam Kebakaran;
 - 2) Layanan Pengamanan Aset Investasi.
8. Satuan Pemeriksa Intern, memiliki Layanan Audit Internal BP Batam.
9. Direktorat Evaluasi dan Pengendalian, memiliki layanan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perusahaan bidang perhubungan dan kerjasama perusahaan.
10. Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Resiko, memiliki 3 (tiga) jenis layanan yaitu:
 - 1) Layanan pembinaan unit usaha di bidang peningkatan kinerja;
 - 2) Layanan penyusunan bahan penilaian kinerja unit usaha;
 - 3) Layanan pelaporan asset pengelolaan unit usaha;
11. Direktorat Restrukturisasi, memiliki layanan pembinaan budaya dan analisa strategi restrukturisasi.
12. Pusat Perencanaan Program Strategis, memiliki Layanan Jasa Persetujuan Izin Fatwa Planologi.
13. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memiliki 5 (lima) jenis layanan meliputi:
 - a. Pelaksanaan verifikasi teknis dan persetujuan/penolakan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - b. Layanan penerbitan perizinan lainnya;
 - c. Layanan informasi, penanganan keluhan, dan layanan depan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan pelayanan dokumen tanah;
 - d. Pelayanan perbantuan klarifikasi prosedur dan hambatan pengajuan perizinan berusaha; dan
 - e. Pengelolaan pelayanan pengaduan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

H. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan BP Batam sebanyak 2.557 karyawan dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN	JUMLAH
PNS	1
NON PNS	5
POLRI	0
TNI	0
SUBTOTAL	6
II. PEGAWAI TETAP PNS/POLRI	JUMLAH
PNS DPK	61
PNS DPB	1475
PNS TGS	4
CPNS DPB	1
POLRI	2
SUBTOTAL	1543
III. PEGAWAI TETAP NON PNS/POLRI	JUMLAH
NON PNS	564
CAPEG NON	0
SUBTOTAL	564
JUMLAH PEGAWAI TETAP	564
IV. PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	JUMLAH
STRUKTURAL	0
P2K PELAKSANA	423
P2K STRUKTURAL	3
STAF KHUSUS	7
TENAGA AHLI	11
JUMLAH PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	444
GRAND TOTAL	2557

Tabel 1.1. Jumlah SDM BP Batam

I. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh

Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*)

<p>Internal</p>	<p>Kekuatan (Strengths)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asset yang besar; 2. Jumlah SDM yang banyak; 3. Memiliki kewenangan/ Legalitas dalam pengelolaan KPBPB - Batam; 4. Tersedianya Produk Perencanaan dan Penelitian yang dihasilkan; 5. Hubungan kerjasama yang baik dengan investor, asosiasi dan pemerintah; 6. Pelayanan ke Stakeholder sudah menggunakan sistem Online Single Submission; 7. Keterbukaan Publik / transparansi dalam penyampaian informasi; 8. Responsif terhadap keluhan stakeholders. 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan; 2. Jumlah SDM belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan; 3. Pengelolaan asset belum optimal sehingga salah satunya menyebabkan penerimaan belum optimal; 4. Hasil Kordinasi dan komunikasi yang dilakukan belum optimal; 5. Kurangnya publikasi terhadap rencana program dan kegiatan; 6. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK).
<p>Eksternal</p>	<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Wilayah kewenangan KPBPB-Batam (Barelang dan sekitarnya); 2. Tumbuhnya ASEAN menjadi blok ekonomi yang penting; 3. Potensi pengembangan jasa, logistik dan kepariwisata di kawasan KPBPB – Batam; 4. Pemindehan lokasi perusahaan akibat globalisasi; 5. Munculnya sektor ekonomi baru seperti industri hijau dan ICT; 6. Investasi yang dapat di kembangkan akibat dari perang dagang antara negara adikuasa (USA dan China). 	<p>Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan pergantian pimpinan internal KPBPB Batam yang cukup sering berubah; 2. Pengaruh politik dalam pengambilan keputusan strategis; 3. Globalisasi dan TIK yang cepat berubah dan berkembang; 4. Kompetisi kawasan industri lainnya di regional asia pasifik; 5. Masih adanya aturan/ regulasi yang kurang berpihak terkait penanaman investasi / modal di KPBPB- Batam; 6. Publikasi negatif oleh media terkait dalam pengelolaan KPBPB – Batam; 7. Meningkatnya arus tenaga kerja asing ke Batam terkait diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Tabel 1.2. Analisis SWOT

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Memperhatikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam periode sebelumnya, dan dimulainya acuan baru kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan (BP) Batam Tahun 2020—2024, maka telah ditetapkan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan sasaran strategis BP Batam hingga 5 tahun ke depan.

Delapan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi di Batam;
2. Realisasi Jumlah PNBPN;
3. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU;
4. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
5. Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi;
6. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan;
7. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang;
8. Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan.

Penetapan IKU tersebut telah memenuhi kriteria minimum sebagai indikator kinerja yang baik, antara lain:

1. Spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/*outcomes*);
2. Keterukuran (*measurability*) dan keterkaitan (*relevance*) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
3. Indikator yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*) oleh organisasi;
4. Menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*timebound*).

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam 2020—2024. Renstra yang disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, merupakan dasar dari perencanaan dan harus diimplementasikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam. Penyusunan Renstra pun telah mengikuti pola, berupa tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

A.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi

merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi pemerintah, dalam hal ini BP Batam.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2015-2019, serta memperhatikan hasil analisis isu strategis dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka visi pembangunan BP Batam tahun 2020-2024 seperti yang tertulis di dalam Renstra BP Batam 2020-2024 adalah:

**“BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk
mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”**

A.2. Misi

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan misi BP Batam, sebagai berikut:

1. Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif;
2. Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan;
6. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Badan Pengusahaan Batam, dalam Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 161 Tahun 2015, menetapkan nilai-nilai Budaya Kerja, yang disingkat dengan SPIRIT, sebagai berikut:

1. Service Excellence.

Dalam *Service Excellence* terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

2. Professional.

Dalam *Professional* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3. Innovative.

Dalam *Innovative* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam menggunakan dengan optimal semua sumber daya yang ada dengan kreatifitas tinggi untuk menghasilkan perbaikan dan perubahan positif yang berkelanjutan ke arah kemajuan.

4. Integrity.

Dalam *Integrity* terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata dan berperilaku dan bertindak, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan baik dan benar, konsisten serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

5. Entrepreneurship.

Dalam *Entrepreneurship* terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam memiliki jiwa dan perilaku menciptakan peluang usaha dengan mempertimbangkan risiko.

A.3. Tujuan

Berdasarkan pada faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), selanjutnya untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam ditetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pencapaian dimaksud. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengusahaan Batam dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatkan investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Melalui tujuan di atas maka diharapkan akan menarik dan mengembangkan investasi dalam sektor industri, perdagangan, alih kapal (*transshipment*) dan pariwisata, juga dapat lebih mengembangkan, serta membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan lima tahun ke depan maka sasaran strategis Badan Pengusahaan Batam telah ditetapkan dalam tiap tahun anggaran dan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu juga menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui rangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Badan Pengusahaan Batam dalam menetapkan sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis. Untuk mencapai tujuan sebagaimana Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut. Sama halnya seperti sasaran terhadap tujuan, program-

program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Sasaran Strategis Badan Pengusahaan Batam tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Investasi pada Kawasan Pengusahaan;
2. Kinerja Pendapatan;
3. Pengembangan Sistem Informasi BLU;
4. Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam;
5. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi;
6. Kinerja Pelayanan Perijinan;
7. Inovasi Pelayanan.

Berikut adalah tabel keterkaitan antara sasaran dan indikator kinerja:

Sasaran	Indikator Kinerja
1.1 Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1.1.1. Realisasi Investasi di Batam
1.2. Kinerja Pendapatan	1.2.1. Realisasi Jumlah PNBP
1.3. Pengembangan Sistem Informasi BLU	1.3.1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU
1.4. Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	1.4.1. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
1.5. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	1.5.1. Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi
1.6. Kinerja Pelayanan Perijinan	1.6.1. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan
	1.6.2 Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang
1.7 Inovasi Pelayanan	1.7.1 Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan

Tabel 2.1 Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam

A.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dipilih strategi yang tepat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan strategis BP Batam, merupakan pedoman dalam penyusunan sasaran strategi dan program kerja yang direncanakan dan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang akan datang dan diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BP Batam

dengan mempertimbangkan potensi sumber daya BP Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Bersamaan dengan hal tersebut, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan BP Batam telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dalam upaya mencapai visi misi BP Batam, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Keempat (2020—2024) yang dirumuskan dalam NAWACITA yang memiliki agenda, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum dan pertahanan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Strategi yang akan dilaksanakan BP Batam mencakup internal dan eksternal, yaitu:

a. Internal

1. Meningkatkan tata kelola sistem pengaduan pelayanan BP Batam;
2. Melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance dilingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam antara lain telah dilaksanakannya pemantapan implementasi SAKIP di BP Batam itu sendiri;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja;
4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), manajerial dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.

b. Eksternal

1. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan kepelabuhanan, industri dan jasa dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan dalam peningkatan pengembangan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap rencana pengembangan dan promosi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berikut di bawah ini ditampilkan alur visi yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja BP Batam, yaitu:

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Utama	
BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1) Menciptakan iklim investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif	Meningkatkan investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam	1.1 Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1.1.1 Realisasi Investasi di Batam	
	2) Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif		2.1 Kinerja Pendapatan	2.1.1 Realisasi Jumlah PNBPN	
	3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		3.1 Pengembangan Sistem Informasi BLU	3.1.1 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	
	4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		4.1 Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	4.1.1 Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	
	5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan		5.1 Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	5.1.1 Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi	
	6) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam			6.1 Kinerja Pelayanan Perijinan	6.1.1 Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan 6.1.2 Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang
				7.1 Inovasi Pelayanan	7.1.1 Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan

Tabel 2.2. Alur Visi – Misi BP Batam 2021

A.6. Program

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, Badan Pengusahaan Batam menetapkan kebijakan dan program periode 2020-2024 sebagai arah yang akan diambil sesuai dengan misinya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta akan memperoleh alokasi anggaran.

Program tahun 2021 yang disusun merupakan upaya pencapaian sasaran pada Renstra Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagaimana berikut:

1. Program Dukungan Manajemen; merupakan program yang bersifat internal BP Batam untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan BP Batam. Program ini dijalankan oleh 2 (dua) Keanggotaan yaitu Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan dan Anggota Bidang Kebijakan Strategis yang meliputi Unit Kerja Eselon II di Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Hukum, Kantor Perwakilan Jakarta, Biro Humas Promosi dan Protokol, Pusat Perencanaan Program Strategis, Pusat Harmonisasi Kebijakan, dan Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK.
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis; merupakan program pembangunan BP Batam yang ditujukan untuk menghasilkan pelayanan bagi masyarakat dan stakeholders. Program ini dijalankan oleh 2 (dua) Keanggotaan yaitu Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi dan Anggota Bidang Pengusahaan dengan Unit Kerja Eselon II meliputi Direktorat Pengelolaan Lahan, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Direktorat Layanan Penanaman Modal dan Lalu Lintas Barang, Direktorat Pengamanan Aset, Direktorat Restrukturisasi, Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Direktorat Evaluasi dan Pengendalian serta Unit Usaha BP Batam.

A.7. Rencana Kinerja

Penjabaran dari Renstra BP Batam Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam). Rencana kinerja BP Batam Tahun 2021 ditetapkan program, kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pokok (Misi 1)

Menciptakan iklim investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif

- a. Investasi pada Kawasan Pengusahaan

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Realisasi Investasi di Batam

Kegiatan pokok (Misi 2)

Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif

- a. Kinerja Pelayanan Perijinan

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan
2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang

Kegiatan pokok (Misi 3)

Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam

- a. Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Kegiatan pokok (Misi 4)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam

- a. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi

b. Pengembangan Sistem Informasi BLU

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Kegiatan pokok (Misi 5)

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan

a. Inovasi Pelayanan

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan

Kegiatan pokok (Misi 6)

Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam

a. Kinerja Pendapatan

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Realisasi Jumlah PNB

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat antara hubungan IKU dan Unit Kerja yang bertanggung jawab:

TUJUAN SASARAN	IKU		PROGRAM/KEGIATAN	UNIT PELAKSANA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam				
Investasi pada Kawasan Pengusahaan	Realisasi Investasi di Batam		Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPN		Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Biro Keuangan
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam, Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi		Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum
Investasi pada Kawasan Pengusahaan, Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Realisasi Investasi di Batam	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Biro Humas, Promosi dan Protokol
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPN		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Kantor Perwakilan
Investasi pada Kawasan Pengusahaan	Realisasi Investasi di Batam		Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Pusat Perencanaan Program Strategis
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam, Pengembangan Sistem Informasi BLU	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Pusat Harmonisasi Kebijakan
Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi		Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Pusat Harmonisasi Kebijakan
Inovasi Pelayanan	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan		Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK

Program Pengembangan Kawasan Strategis				
Investasi pada Kawasan Pengusahaan, Kinerja Pendapatan	Realisasi Investasi di Batam	Realisasi Jumlah PNBPNBP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Direktorat Pengelolaan Lahan
Kinerja Pelayanan Perijinan, Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Direktorat Pengelolaan Lahan
Kinerja Pendapatan, Inovasi Pelayanan	Realisasi Jumlah PNBPNBP	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Direktorat Infrastruktur Kawasan
Investasi pada Kawasan Pengusahaan, Kinerja Pelayanan Perijinan	Realisasi Investasi di Batam	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Realisasi Jumlah PNBPNBP	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
Investasi pada Kawasan Pengusahaan	Realisasi Investasi di Batam		Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	Direktorat Pengamanan Aset
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPNBP		Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Direktorat Restrukturisasi
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPNBP		Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPNBP		Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian
Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Realisasi Jumlah PNBPNBP	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi	Badan Usaha Bandara dan Teknologi Informasi
Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Realisasi Jumlah PNBPNBP	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Badan Usaha Pelabuhan

Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Realisasi Jumlah PNB	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Badan Usaha Rumah Sakit
Kinerja Pendapatan, Inovasi Pelayanan	Realisasi Jumlah PNB	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
Pengembangan Sistem Informasi BLU, Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Satuan Pemeriksa Intern

Tabel 2.3. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU

B. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja BP Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Investasi pada Kawasan Pengusahaan.	Realisasi Investasi di Batam.	25 Triliun
2	Kinerja Pendapatan.	Realisasi Jumlah PNBP.	1,67 Triliun
3	Pengembangan Sistem Informasi BLU.	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.	100%
4	Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam.	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.	≥ 85,00 (Skala 1 - 100) (Predikat Baik)
5	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi.	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi.	Predikat WBK 2 (Dua) Unit Kerja
6	Kinerja Pelayanan Perijinan.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan.	100%
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang.	100%
7	Inovasi Pelayanan.	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan.	100%

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Pengukuran Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator-indikator tertentu (*outputs* atau *outcomes*) yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra BP Batam 2020-2024. Indikator *inputs* adalah semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran, yaitu berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. Indikator *outputs* adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung, baik berupa fisik maupun nonfisik. Indikator *outcomes* adalah suatu gambaran dari hasil nyata suatu kegiatan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh lingkungan di sekitarnya.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Batam dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2021 telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, dan secara detail capaian kinerja sasaran diuraikan berikut ini.

Sasaran *Pertama* adalah Investasi Pada Kawasan Pengusahaan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yaitu Realisasi Investasi di Batam.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Ke-1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Investasi pada Kawasan Pengusahaan	Realisasi Investasi di Batam	Rp 25 Triliun	Rp 14.880.794.320.000,-	59,52

Sumber Data : Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Investasi pada Kawasan Pengusahaan merupakan sasaran pertama dalam sasaran strategis yang ingin dicapai dengan target Rp 25 Triliun. Tujuan dari capaian tersebut adalah sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun realisasi investasi tersebut didapat berdasarkan akumulasi nilai investasi luar negeri (PMA) dan investasi dalam negeri (PMDN) di wilayah Batam. Pencapaian investasi di Batam pada Tahun 2021 terealisasi sebesar US\$ 1.019.232.487,67,- dengan kurs 1 USD = Rp 14.600,- setara Rp 14.880.794.320.000,- atau 59,52% dari target Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi investasi Tahun 2020 memiliki capaian yang lebih optimal yaitu sebesar US\$ 1.355.234.319,- dengan kurs 1 USD = Rp 14.500,- setara Rp 19.650.897.625.500,- atau 135,52% dari target US\$ 1.000.000.000,-.

Sasaran *Kedua* adalah Kinerja Pendapatan. Secara signifikan Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Realisasi Jumlah PNBP.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	TOTAL REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
2	Kinerja Pendapatan	Realisasi jumlah PNBP	Rp 1,67 Triliun	Rp 1.423.077.691.809	85,21

Sumber Data : Biro Keuangan tahun 2021

Realisasi Jumlah PNPB Batam pada Tahun 2021 dapat dilihat melalui Pendapatan Kantor Pusat sebagai pengelolaan kawasan dengan realisasi sebesar Rp 499.851.568.340,55,- persentase capaian sebesar 98,20% dan Pendapatan Kantor Mandiri sebagai perusahaan lainnya dengan realisasi sebesar Rp 923.226.123.468,18,- persentase capaian sebesar 79,52%. Indikator Realisasi Jumlah PNPB yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar Rp 1,67 Triliun. Realisasi Jumlah PNPB Batam pada Tahun 2021 secara keseluruhan mencapai realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 85,21% atau sebesar Rp 1.423.077.691.809,- dari target Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi jumlah PNPB Tahun 2020 memiliki capaian yang lebih optimal yaitu sebesar Rp 1.307.000.000,000- atau setara 128,15% dari target Rp 1.020.000.000.000,-.

Sasaran *Ketiga*, Pengembangan Sistem Informasi BLU. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran ke-3

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
3	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	125%	125

Sumber Data : Pusat Data dan Sistem Informasi tahun 2021

**) Perhitungan Realisasi IKU Penyelesaian Modernisasi pengelolaan BLU yang mencapai 125% Merupakan mandatori dari PPK-BLU, BP Batam mempunyai target sebesar 100% namun atas pencapaian tersebut PPK-BLU memberikan bonus nilai 25% yang formulanya ditetapkan sendiri oleh PPK-BLU*

Indikator tingkat Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU selama Tahun

2021 telah direalisasikan sebesar 125%. Adapun capaian tersebut diperoleh dari 8 (delapan) variabel kinerja antara lain: Operasional Aplikasi BIOS; Sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU untuk penyempurnaan proses bisnis, analisa data dan pengambilan keputusan, memiliki realisasi sebesar 20% dari target 20%. Ketersediaan *Website* yang Representatif; Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh siapa saja kapan saja dengan

menggunakan piranti apa saja, tidak terikat dengan sistem operasi atau Bahasa pemrograman yang digunakan, memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%. Ketersediaan Database Terpusat/Terintegrasi; Ketersediaan data terkait pendekatan teknologi yang menggabungkan unsur-unsur inti dari sistem manajemen data, sistem manajemen konten, gudang data dan aplikasi lainnya menjadi platform umum memiliki realisasi sebesar 15% dari target 15%, Ketersediaan *Dashboard* Internal dan Eksternal; Merupakan sistem manajemen kinerja yang dapat memfasilitasi suatu organisasi dalam mengukur, memonitor dan mengelola kinerja proses bisnis baik dari aspek finansial maupun non finansial yang dapat digunakan sebagai alat pemantauan pencapaian kinerja BLU memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%, Ketersediaan *Web Service* untuk Transfer Data ke Kementerian Keuangan; Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh siapa saja kapan saja dengan menggunakan piranti apa saja, tidak terikat dengan sistem operasi atau Bahasa pemrograman antara BP Batam dengan PPK-BLU memiliki realisasi 35% dari target 35%, Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi; Tersedianya SOP Layanan BP Batam yang terintegrasi dengan sistem informasi BIOS BLU dengan memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%, Ketersediaan dan Implementasi Sistem Aplikasi untuk Pengelolaan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik; Adalah tersedianya sistem aplikasi persuratan yang mengikuti tata naskah Dinas memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%, dan Implementasi Inovasi di Bidang Teknologi Informasi untuk Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Keuangan; Adalah sistem aplikasi yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan di BP Batam memiliki realisasi sebesar 15% dari target 15%. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan modernisasi pengelolaan BLU jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar 83%. Hal ini terus menjadi dorongan bagi BP Batam kedepannya untuk perbaikan dalam inovasi yang mudah dan cepat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Sasaran *Keempat*, Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
4	Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	≥85.00 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	83,86 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	98,66%

Sumber Data : Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja tahun 2021

Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BP Batam mulai dilaksanakan pada Semester II (Agustus 2021). Adapun unsur yang dinilai dalam pelaksanaan SKM di setiap pelayanan public yang disurvei adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

KRITERIA DALAM PENENTUAN NILAI SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 -64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 -88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Baik Sekali

Tabel 3.4.1 Kriteria Penentuan Nilai SKM

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada 6 (enam) lokus pelayanan publik yang disurvei berikut:

1. Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam 350 90,48 (A)
 2. Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim 384 88,49 (A)
 3. Badan Usaha Pelabuhan BP Batam 365 84,10 (B)
 4. Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan (Fasilitas dan Lingkungan) 390 80,87 (B)
 5. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal 390 82,51 (B)
 6. Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman (Rusun) 350 76,71 (B)
- Total Responden 2.229 83,86 (B).

Sasaran *Kelima*, Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran Ke-5

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
5	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi	Predikat WBK 2 (Dua) Unit Kerja	70,00%	70,00

Sumber Data : Biro Hukum dan Organisasi tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi internal BP Batam, upaya terwujudnya pelayanan yang bebas dari korupsi terus dilakukan, salah satunya dengan cara menetapkan unit kerja dalam memperoleh predikat WBK sehingga kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat menjadi lebih baik. Penilaian Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 tentang Pendoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun realisasi capaian target Predikat WBK 2 (dua) Unit Kerja sudah sampai pada tahap terselesaikannya dokumen Zona Integritas oleh 2 (dua) unit yang diusulkan. Terkait pengajuan usulan WBK 2 (dua) Unit Kerja ke Kemenpan RB mulai dilakukan pada Agustus 2021. Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi diseluruh daerah yang dikelola oleh BP Batam pada Tahun 2021 telah memenuhi 70% realisasi. Capaian Tahun 2021 jika dibandingkan Tahun 2020, capaiannya adalah 80%, namun parameter yang digunakan pada 2 periode dimaksud mempunyai perbedaan yang tidak bisa dibandingkan.

Sasaran *Keenam*, Kinerja Pelayanan Perijinan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 indikator yang merupakan usulan Indikator Kinerja Utama baru oleh BP Batam, antara lain:

1. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan
2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	(%)
1		2		3	4	5
6	Kinerja Pelayanan Perijinan	1	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan	100%	65,03%	65,03%
		2	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Permasukan Barang	100%	95,48%	95,48%

Sumber Data : Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Dalam rangka memproses perijinan secara tertib dan tepat waktu telah ditetapkan waktu penyelesaian perijinan lahan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 18 Tahun 2020 yaitu dengan waktu penyelesaian 28 hari kerja. Berikut persentase penyelesaian perijinan lahan selama Tahun 2021:

Tabel 3.7. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6

Jenis Layanan	JANUARI					FEBRUARI					MARET				
	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)
Pengalokasian Lahan	14	0	14	11	78,57	14	0	14	13	92,86	10	0	10	10	100,00
Perpanjangan UWT	647	5	642	151	23,34	894	40	854	129	14,43	832	26	806	212	25,48
Total	661	5	656	162	24,51	908	40	868	142	15,64	842	26	816	222	26,37

Jenis Layanan	APRIL					MEI					JUNI				
	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)
Pengalokasian Lahan	39	23	16	16	41,03	540	17	523	481	89,07	214	15	199	192	89,72
Perpanjangan UWT	447	4	443	236	52,8	349	1	348	262	75,07	455	4	451	365	80,22
Total	486	27	459	252	51,85	889	18	871	743	83,58	669	19	650	557	83,26

Jenis Layanan	JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER				
	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)
Pengalokasian Lahan	69	6	63	40	57,97	79	20	59	58	73,42	251	15	236	210	84
Perpanjangan UWT	355	12	343	298	83,94	561	23	538	410	73,08	454	30	424	193	42,51
Total	424	18	406	338	79,72	640	43	597	468	73,13	705	45	660	403	57,16

Jenis Layanan	OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					TOTAL CAPAIAN (%)
	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase (%)	
Pengalokasian Lahan	270	11	259	250	93	403	11	392	388	96,28	84	0	84	84	100	65,03
Perpanjangan UWT	505	16	489	420	83,17	735	0	735	735	100	394	0	394	394	100	
Total	775	27	748	670	86,45	1138	11	1127	1123	98,68	478	0	478	478	100	

Sumber Data : Direktorat Pengelolaan Pertanahan tahun 2021

Berdasarkan data diatas, Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan pada Tahun 2021 telah memenuhi realisasi dengan rata-rata sebesar 65,03%, BP Batam akan terus meningkatkan kinerja pelayanan perijinan lahan.

Sementara itu terkait waktu penyelesaian perijinan pemasukan barang ditetapkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan

Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penerbitan Izin Pemasukan Sementara dari LDP dengan waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung dengan waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari. Berikut persentase penyelesaian pemasukan barang selama Tahun 2021:

Tabel 3.8. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERIZINAN	JANUARI			FEBRUARI			MARET		
		PERMOHONAN		PERSENTASE PENYELESAIAN	PERMOHONAN		PERSENTASE SESAI	PERMOHONAN		PERSENTASE PENYELESAIAN
		MASUK	SELESAI		MASUK	SELESAI		MASUK	SELESAI	
Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang	Pemasukan Barang	743	295	39,70%	678	542	79,94%	866	742	85,68%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERIZINAN	APRIL			MEI			JUNI		PERSENTASE PENYELESAIAN
		PERMOHONAN		PERSENTASE PENYELESAIAN	PERMOHONAN		PERSENTASE SESAI	PERMOHONAN		
		MASUK	SELESAI		MASUK	SELESAI		MASUK	TOTAL SELESAI	
Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang	Pemasukan Barang	953	953	100%	772	772	100%	832	832	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERIZINAN	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER		
		PERMOHONAN		PRESENTASE PENYELESAIAN	PERMOHONAN		PRESENTASE PENYELESAIAN	PERMOHONAN		PRESENTASE PENYELESAIAN
		MASUK	TOTAL SELESAI		MASUK	TOTAL SELESAI		MASUK	TOTAL SELESAI	
Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang	Pemasukan Barang	842	842	100%	872	872	100%	877	877	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERIZINAN	OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER			Jumlah Masuk 1 Tahun	Jumlah Selesai 1 Tahun	PRESENTASE CAPAIAN
		PERMOHONAN		PRESENTASE PENYELESAIAN	PERMOHONAN		PRESENTASE PENYELESAIAN	PERMOHONAN		PRESENTASE PENYELESAIAN			
		MASUK	TOTAL SELESAI		MASUK	TOTAL SELESAI		MASUK	TOTAL SELESAI				
Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang	Pemasukan Barang	987	987	100%	927	927	100%	10625	10625	100%	19974	19266	96,46%

Sumber Data : Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang pada Tahun 2021 telah memenuhi 100% realisasi. BP Batam akan terus meningkatkan kinerja pelayanan perijinan pemasukan barang.

Sasaran *Ketujuh*, Inovasi Pelayanan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Sasaran Ke-7

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	
7	Inovasi Pelayanan	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Lingkungan	100%	100%	100

Sumber Data : Direktorat Infrastruktur Kawasan tahun 2021

Indikator tingkat Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan ditargetkan pada tahun 2021 sebanyak 3 destinasi. Pada Tahun 2021 telah memenuhi 100,00% realisasi dari target sebesar 100%. Pencapaian indikator tersebut diidentifikasi melalui:

Tabel 3.10. Indikator Kinerja Sasaran Ke-7

Lokasi Wisata	Uraian	Target	Bobot	Realisasi	Total
Taman Rusa - Sekupang	1) Terbangunnya fasilitas kolam ikan, kolam pancing, kolam bermain anak (30%); 2) Terbangunnya area parkir (10%).	100%	40%	100%	100%
Taman Kolam - Sekupang	Terbangunnya fasilitas <i>jogging track</i> (45%).	100%	45%	100%	
Fisherism – Tg. Riau	1) Terbangunnya pembuatan taman (5%); 2) Terbangunnya area <i>entrance</i> dan <i>promenade</i> (10%).	100%	15%	100%	

Sumber Data : Direktorat Infrastruktur Kawasan tahun 2021

- *1). *Terbangunnya fasilitas kolam ikan, kolam pancing, kolam bermain anak, Terbangunnya area parkir di Taman Rusa – Sekupang merupakan kelanjutan dari realisasi tahap sebelumnya dalam rangka mewujudkan tempat pariwisata dan rekreasi, sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitarnya, serta sebagai lokasi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan keanekaragaman sumber daya hayati yang ada di tempat ini dapat dimanfaatkan secara lestari sebagai penganekaragaman usaha untuk peningkatan potensi penerimaan PNBP.*
- 2. *Terbangunnya fasilitas jogging track di Taman Kolam – Sekupang merupakan kelanjutan dari realisasi tahap sebelumnya dalam rangka mewujudkan fasilitas olah raga dan sarana rekreasi bagi masyarakat Batam guna meningkatkan imunitas, kesehatan dan kebahagiaan masyarakat sebagai penganekaragaman usaha untuk peningkatan potensi penerimaan PNBP..*
- 3. *Terbangunnya pembuatan taman dan area entrance dan promenade Fisherism - Tg.Riau merupakan kelanjutan dari realisasi tahap sebelumnya dalam rangka mewujudkan tujuan wisata baru sebagai penganekaragaman usaha untuk peningkatan potensi penerimaan PNBP.*

Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan pada Semester I Tahun 2021:

A. **Taman Rusa – Sekupang** memenuhi realisasi sebesar 100% dengan bobot realisasi sebesar 40%. Target Pengembangan Taman Rusa adalah terbangunnya fasilitas kolam ikan, kolam pancing, kolam bermain anak dan terbangunnya area parkir.

Adapun tahapan yang telah dilaksanakan berupa:

- 1) Pengerjaan Pos Ticketing;
- 2) Pemasangan Batu Miring Disamping Logistik
- 3) Penggalian dan Urukkan Kolam Ikan, Kolam Pancing dan Kolam Bermain Anak;
- 4) Pembentukan Sculpture Patung Rusa Jantan dan Patung Rusa Betina;
- 5) Pemadatan Tanah untuk Area Parkir.

B. **Taman Kolam – Sekupang** memenuhi realisasi sebesar 100% dengan bobot realisasi sebesar 45%. Target Pengembangan Taman Kolam adalah terbangunnya fasilitas *jogging track*. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan berupa:

- 1) Galian dan Urukkan Tanah Sepanjang \pm 1300 m;
- 2) Pemasangan Saluran U60;
- 3) Persiapan untuk Urukkan Tanah Bauksit;
- 4) Persiapan Batu Andesit untuk Memulai Pengerjaan *Jogging Track*.

C. **Fisherism – Tanjung Riau** memenuhi realisasi sebesar 100% dengan bobot realisasi sebesar 15%. Target Pengembangan Fisherism adalah terbangunnya taman dan area *entrance* dan *promenade*.

2. Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tersaji dalam perjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2021 menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 87,36%. Belum maksimalnya pencapaian realisasi kinerja BP Batam di pengaruhi oleh tidak tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Adapun capaian sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Capaian IKU Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama		Target	Total Realisasi	Capaian(%)
1	Investasi pada kawasan pengusaha	1.	Realisasi Investasi di Batam	Rp 25 000.000.000.000	Rp 14.880.794.320.000	59,52%
2	Kinerja Pendapatan BP Batam	2.	Realisasi Jumlah PNBP	Rp 1.670.000.000.000	Rp 1.423.077.691.809	85,21%
3	Pengembangan Sistem Informasi BLU	3.	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	125%	125%
4	Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	4.	Tercapaiannya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	≥= 85.00 (skala 1-100) (Predikat Baik)	98,66%	98,66%
5	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	5.	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi	Predikat WBK 2 (dua) Unit Kerja 100%	70,00%	70,00%
6	Kinerja Pelayanan Perizinan	6.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan Lahan	100%	65,03%	65,03%
		7.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan Pemasukan Barang	100%	95,48%	96,46%
7	Inovasi Pelayanan	8.	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan	100%	100,00%	100,00%
Rata-rata capaian						87,49%

Sumber Data : BP Batam tahun 2021

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2021

Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) pada Tahun 2021 sebesar Rp Rp 1.423.077.691.809,- atau 85,21% dari target PNBP sebesar Rp 1.670.000.000.00,- dengan rincian per unit sebagai berikut:

Tabel 3.12. Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja	Penerimaan		
		TA 2021		
		Target	Realisasi (s/d Desember 2021)	Persentase
Realisasi Jumlah PNBPN	A. PENDAPATAN DARI PENGELOLAAN KAWASAN	Rp 509.956.000.002,37	Rp 499.851.568.341	98,019%
	1. Dir. Pengelolaan Pertanahan	Rp 464.155.000.000,70	Rp 470.776.947.458	101,4%
	2. Dir. Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp 1.257.000.000,73	Rp 1.226.830.000	97,6%
	3. Biro Keuangan	Rp 42.675.000.000,54	Rp 26.268.949.459	61,6%
	4. Direktorat Infrastruktur Kawasan	Rp 1.869.000.000,40	Rp 1.578.841.424	84,5%
	B. PENDAPATAN DARI PENGUSAHAAN LAINNYA	Rp 1.160.043.999.997,63	Rp 923.226.123.468	79,6%
	1. Badan Usaha Pelabuhan	Rp 495.895.000.000,63	Rp 317.233.724.226	64,0%
	2. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	Rp 223.640.000.000,80	Rp 128.076.256.525	57,3%
	3. Badan Usaha Rumah Sakit	Rp 150.000.000.000,00	Rp 218.269.483.737	145,5%
	4. Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	Rp 289.439.000.000,16	Rp 259.402.321.600	89,6%
	5. Kantor Perwakilan	Rp 1.069.999.996,04	Rp 244.337.380	22,8%
	6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum			
	Total	Rp 1.670.000.000.000,00	Rp 1.423.077.691.809	85,21%

Sumber Data : Biro Keuangan tahun 2021

2. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021

Realisasi Penyerapan Anggaran pada Tahun 2021 sebesar 82,82% dengan total penyerapan sebesar Rp 2.029.179.073.622,10,- dari pagu yang diberikan sebesar Rp 2.450.075.127.000,-.

Tabel 3.13. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	KODE KEG.	KEGIATAN	T.A 2021		Persen (%)
			PAGU	REALISASI	
1	A	Belanja Rupiah Murni	Rp 287,000,000,000.00	Rp 281,602,073,934.00	98.12
2	B	Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp 45,000,000,000.00	Rp 44,997,443,507.00	99.99
3	C	Belanja Rupiah Murni Pendamping	Rp 12,000,000,000.00	Rp 7,026,827,099.00	58.56
4	D	Belanja PNBPNP	Rp 2,106,075,127,000.00	Rp 1,695,552,729,082.10	80.51
	I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Rp 1,192,432,845,000.00	Rp 898,663,596,334.79	80.20
	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp 31,859,314,000.00	Rp 20,713,397,495.00	65.02
	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp 39,339,079,000.00	Rp 36,541,490,517.00	92.89
	5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi	Rp 122,828,829,000.00	Rp 102,381,726,974.00	83.35
	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp 232,231,320,000.00	Rp 221,138,603,213.55	95.22
	5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp 591,610,081,000.00	Rp 365,297,811,485.00	73.63
	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp 11,571,576,000.00	Rp 5,855,424,489.00	50.60
	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp 103,072,648,000.00	Rp 92,016,212,981.24	89.98
	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	Rp 46,800,484,000.00	Rp 43,913,292,090.00	93.83
	5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp 5,293,850,000.00	Rp 4,756,484,453.00	89.85
	5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp 3,826,737,000.00	Rp 2,652,670,628.00	69.32

	5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp 3,998,927,000.00	Rp 3,396,482,009.00	84.93
	II.	Program Dukungan Manajemen	Rp 913,642,282,000.00	Rp 796,889,132,747.31	87.22
	5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Rp 58,012,871,000.00	Rp 46,878,965,559.00	80.81
	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 128,582,447,000.00	Rp 114,222,473,788.00	88.83
	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp 608,922,164,000.00	Rp 540,701,442,539.50	88.80
	5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp 7,226,822,000.00	Rp 5,399,275,933.00	74.71
	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Rp 27,482,348,000.00	Rp 18,076,792,504.00	65.78
	5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Rp 9,940,781,000.00	Rp 7,291,810,988.00	73.35
	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Rp 1,826,403,000.00	Rp 1,504,442,932.00	82.37
	5978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp 36,987,104,000.00	Rp 33,890,190,882.81	91.63
	5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Rp 7,299,410,000.00	Rp 5,843,662,181.00	80.06
	5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Rp 27,361,932,000.00	Rp 23,080,075,440.00	84.35
		JUMLAH	Rp 2,450,075,127,000.00	Rp 2,029,179,073,622.10	82,82

Sumber Data : Biro Keuangan tahun 2021

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengusahaan Batam terhadap capaian kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, Badan Pengusahaan Batam menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Melihat hasil yang dicapai pada Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengusahaan Batam telah berupaya secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka pencapaian Visi dan Misi.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2021, menunjukkan capaian sasaran strategis pada Tahun 2021 dengan nilai rata-rata capaian sebesar 87,36%.

B. Saran

Langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam untuk tahun selanjutnya meliputi:

1. Perlunya tata kelola Sumber Daya Manusia guna menunjang tugas dan fungsi tiap unit kerja di BP Batam;
2. Perlunya regulasi yang mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan stakeholder lainnya agar dapat dapat bersinergi membangun ekonomi Batam;
3. Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2021 yang telah disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

Data Dukung Dari Pusat Data dan Sistem Informasi Sasaran Strategis Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

PERSIAPAN DATA PUSAT DATA DAN INFORMASI TERKAIT KONTAK KINERJA KEPALA BP BATAM TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama	Uraian	Realisasi												Total Capaian	Persentase Capaian			
		Target	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November			Desember		
Operasional Aplikasi BIDS	Operasional Aplikasi BIDS	20%	0%	5%	5%	2,5%						2,5%					20%	
	Ketersediaan website yang representatif	10%	0%	0%	0%												10%	
	Ketersediaan database terpusat/terintegrasi	15%	10%	5%	5%												15%	
Penyediaan Penyediaan Modernisasi Pengelolaan BLU	Ketersediaan dashboard laporan dan statistik	10%	0%	0%	0%												10%	
	Ketersediaan web services untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30%	5%	10%	10%							5%					30%	12,5%
	Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memerlukan Teknologi Informasi	10%	0%	0%	2%												10%	
	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengolahan data sesuai erat secara elektronik	10%	0%	0%	5%												10%	
	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan perbaikan keuangan	15%	15%														15%	
	Jumlah	120%																

Batam, 31 - 12 - 2021
Kepala Bidang Data dan Informasi



Nova Rizkuzuliah Fatah

Data Dukung Kontrak Kinerja Dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan

1/5/22, 8:03 AM

Penyampaian Capaian IKU Pelayanan Perijinan Pertanahan

[Download & Tutup](#)

Attachment :

[CAPAIAN IKU KEPALA BP BATAM TAHUN 2021 lahan - 04012022_fix.xlsx](#) (57.43KB)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

NOTA DINAS

NOMOR 17/A3.1/01/2022

Yth : Ka. Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja

Dari : Direktur Pengelolaan Pertanahan

Hal : Penyampaian Capaian IKU Pelayanan Perijinan Pertanahan

Tanggal : 4 Januari 2022

Sehubungan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai ketepatan waktu penyelesaian perijinan pertanahan, bersama ini kami sampaikan revisi atas data yang telah disampaikan sebelumnya. Asumsi revisi ini menggunakan kriteria bahwa jumlah permohonan masuk dihitung sejak diterima di LMS, permohonan yang tidak bisa diproses dikembalikan ke loket/pemohon dianggap selesai. Kemudian pada bulan Desember 2021 permohonan masuk dicatat sampai dengan tanggal 15 Desember karena mempertimbangkan standar pelayanan 15 hari kerja.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Dan Investasi

Indikator Kinerja Utama	Target	Jenis Layanan	JANUARI					FEBRUARI					MARET				
			Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase
Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan	100%	Pengalokasian Lahan	14	0	14	11	78.57%	14	0	14	13	92.86%	10	0	10	10	100.00%
		Perpanjangan UWT	647	5	642	151	23.34%	894	40	854	129	14.43%	832	26	806	212	25.48%
		Total	661	5	656	162	24.51%	908	40	868	142	15.64%	842	26	816	222	26.37%
Catatan: 1. Permohonan masuk dihitung sejak diterima di lms 2. Pemohon salah mengajukan jenis permohonan dikembalikan ke loket / pemohon (tidak bisa diproses) 3. Desember permohonan masuk dicatat sampai tanggal 15 4. Rumus Perhitungan (Jumlah Perijinan Lahan Selesai Tepat Waktu : Jumlah Pemohon) X 100%																	



LAPORAN KINERJA BP BATAM TAHUN 2021

PERMINTAAN DATA DIREKTORAT PENGELOLAAN PERTANAHAN TERKAIT KONTRAK KINERJA KEPALA BP BATAM TAHUN 2021

APRIL					MEI					JUNI					JULI				
Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase
39	23	16	16	41.03%	540	17	523	481	89.07%	214	15	199	192	89.72%	69	6	63	40	57.97%
447	4	443	236	52.80%	349	1	348	262	75.07%	455	4	451	365	80.22%	355	12	343	298	83.94%
486	27	459	252	51.85%	889	18	871	743	83.58%	669	19	650	557	83.26%	424	18	406	338	79.72%

AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					TOTAL CAPAIAN (%)
Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	Masuk	Proses	Selesai	Selesai ≤ 28 Hari	Persentase	
79	20	59	58	73.42%	251	15	236	210	84%	270	11	259	250	93%	403	11	392	388	96.28%	84	0	84	84	100.00%	65.83%
561	23	538	410	73.08%	454	30	424	193	42.51%	505	16	489	420	83.17%	735	0	735	735	100.00%	394	0	394	394	100.00%	
640	43	597	468	73.13%	705	45	660	493	57.16%	775	27	748	670	86.45%	1138	11	1127	1123	98.68%	478	0	478	478	100.00%	

Batam, 2021
Direktur Pengelolaan Pertanahan

Iham Eka Hartawan

Data Dukung Dari Biro SDM Pelayanan BP Batam yang Bebas dari Korupsi

PERMINTAAN DATA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI TERKAIT KONTRAK KINERJA BP BATAM TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	BOBOT NILAI	REALISASI											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pelayanan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembentukan Tim Penilai Intern	10%		10%										
		Terselesainya Dokumen Zona Integritas oleh 2 unit yang diusulkan	40%	23,73%	23,73%	24,75%	35,45%								
		Pengajuan Usulan WBK 2 unit ke Kemen PAN RB	20%												
		Penilaian WBK oleh Kemen PAN RB	20%												
		Perolehan Predikat WBK	10%												

*) Catatan pendokumentasian :
 - Progres BUBU s.d. Saat ini 97,78 %
 - Progres BUP s.d. Saat ini 79,47 %

Mengetahui
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Lilik Lujayanti

PROGRES PENILAIAN MANDIRI TIM PENILAI INTERNAL (TPI) UNIT KERJA : BUBU DAN BUP S.D. 14 APRIL 2021

NO.	PROSES	BOBOT %	UNIT KERJA	
			BUBU	BUP
PENGUNGKIT				
1	Manajemen Perubahan	5	100,00 %	93,33 %
2	Penataan Tata Laksana	5	100,00 %	85,00 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	100,00 %	97,80 %
4	Penguatan Akuntabilitas	10	100,00 %	66,67 %
5	Penguatan Pengawasan	15	100,00 %	66,67 %
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	86,67 %	67,33 %
TOTAL BOBOT		60	586,7	476,8
			97,78 %	79,47 %
(177,25 / 2 = 88,62 %) atau setara 35,45 %				
HASIL				
1	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	20		
2	Kualitas Pelayanan Publik	20		
		40		

Data Dukung Dari Direktorat Infrastruktur Kawasan Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan

PERMINTAAN DATA DIREKTORAT INFRASTRUKTUR KAWASAN TERKAIT KONTRAK KINERJA BP BATAM TAHUN 2021

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target	Realisasi									Keterangan
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
1	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan	Taman Rusa - Sekupang	100%	1%	1%	1%	4.118%	9.305%	11.248%	26.360%	33.340%	54.420%	
		Taman Kolam - Sekupang		1%	2%	2%	0.221%	23.83%	28.777%	38.827%	81.808%	96.022%	
		Fisherism - Tg. Riau		0%	0%	0%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	Proses Tender (Tahapan Upload Dokumen Tender)

Mengotahui,
Plh Direktur Infrastruktur Kawasan

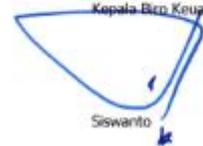


Boy Zasmith

Data Dukung Dari Biro Keuangan Realisasi Pendapatan dan Belanja

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021 SEMESTER 2 (JULI s/d DESEMBER)

KODE KEG.	KEGIATAN	PAGU	JUMLAH	SISA PAGU	KET
			REALISASI		
A	Belanja Rujlah Murni	287.000.000,00	266.210.774.934,00	20.789.225.066,00	92,76
B	Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri	45.000.000,00	44.997.443.507,00	2.556.493,00	99,99
C	Belanja Rujlah Murni Pendamping	12.000.000,00	6.458.585.006,00	5.541.414.994,00	53,82
D	Belanja PNBSP	2.106.075.127,00	1.108.434.167,064	997.640.959,936	52,63
I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.192.432.845,00,00	654.562.188.947,34	537.870.656.052,66	54,89
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PGBP-Batam	31.859.314,00,00	12.370.725.890,00	19.488.588.110,00	38,83
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	39.339.879,00,00	25.444.561.189,00	13.894.517.811,00	64,68
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi	122.828.829,00,00	75.898.168.826,00	46.930.660.174,00	61,79
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	724.344.778,00,00	165.368.192.585,24	58.976.585.414,76	73,71
5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	610.182.242,00,00	264.292.887.892,00	345.889.354.108,00	43,31
5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	11.571.576,00,00	4.374.977.261,00	7.196.598.739,00	37,81
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Linakungan	90.023.150,00,00	72.241.596.277,10	17.781.553.722,90	80,25
5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	46.800.494,00,00	24.994.841.657,00	21.805.642.343,00	53,41
5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	5.293.850,00,00	4.342.517.639,00	951.332.361,00	82,03
5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	6.190.616,00,00	2.233.186.657,00	3.957.429.343,00	36,07
5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	3.998.927,00,00	3.000.533.074,00	998.393.926,00	75,03
II.	Program Dukungan Manajemen	913.642.282,00,00	453.871.978.116,81	459.770.303.883,19	49,68
5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	58.480.907,00,00	43.994.424.794,00	14.486.482.206,00	75,23
5114	Pelayanan Kurumahaftangaan Kesekretariatan dan Pendoaan Barang/Jasa	126.333.133,00,00	78.518.737.933,00	47.814.095.067,00	62,15
5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	611.312.368,00,00	252.347.871.796,00	358.964.496.204,00	41,28
5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	9.008.100,00,00	4.086.374.977,00	4.921.725.023,00	45,36
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	25.692.348,00,00	15.859.911.876,00	9.832.436.124,00	61,73
5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	9.940.781,00,00	4.737.739.452,00	5.203.041.548,00	47,66
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	1.826.403,00,00	1.105.891.402,00	720.511.598,00	60,55
5978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarbitan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	36.987.104,00,00	29.534.325.397,81	7.452.778.602,19	79,85
5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	7.299.410,00,00	5.226.371.160,00	2.073.038.831,00	71,60
5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	26.761.728,00,00	18.460.829.320,00	8.300.898.680,00	68,98
JUMLAH		2.450.075.127,00,00	1.426.100.970.511,15	1.023.974.156.488,85	58,21

Batam, Desember 2021
Kepala Biro Keuangan

Siswanto

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021 (JANUARI s/d DESEMBER 2021)**

KODE KEG.	KEGIATAN	PAGU	JUMLAH	SISA PAGU	KET
			REALISASI		
A	Belanja Rupiah Murni	287.000.000,00	281.602.073.934,00	5.397.926.066,00	98,12
B	Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri	45.000.000,00	44.997.443.507,00	2.556.493,00	99,99
C	Belanja Rupiah Murni Pendamping	12.000.000,00	7.026.827.099,00	4.973.172.901,00	58,56
D	Belanja PNBP	2.106.075.127,00	1.695.552.729,082	410.522.397,918	80,51
I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.192.432.845,000,00	898.663.596.334,79	293.769.248.665,21	75,38
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perencanaan di Kawasan PPN-Batam	31.859.314,000,00	20.713.397.495,00	11.145.916.505,00	65,02
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	39.339.079,000,00	36.541.490.517,00	2.797.588.483,00	92,89
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi	122.828.829,000,00	102.361.726.974,00	20.447.102.026,00	83,35
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	232.231.320,000,00	221.138.603.213,55	11.092.716.786,45	95,22
5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	591.610.081,000,00	365.297.811.485,00	226.312.289.515,00	61,75
5129	Pelayanan Laku Lintas Barang dan Penanaman Modal	11.571.576,000,00	5.855.424.489,00	5.716.151.511,00	50,60
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Linkungan	103.072.648,000,00	92.016.212.981,24	11.056.435.018,76	89,27
5134	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Linkungan	46.800.484,000,00	43.913.292.090,00	2.887.191.910,00	93,83
5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	5.293.850,000,00	4.756.484.453,00	537.365.547,00	89,85
5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	3.826.737,000,00	2.652.670.628,00	1.174.066.377,00	69,32
5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	3.998.927,000,00	3.396.402.009,00	602.444.991,00	84,93
II.	Program Dukungan Manajemen	913.642.282,000,00	796.889.132.747,31	116.753.149.252,69	87,22
5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	58.012.871,000,00	46.878.965.559,00	11.133.905.441,00	80,81
5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Penerimaan Barang/Jasa	128.582.447,000,00	114.222.473.788,00	14.359.973.212,00	88,83
5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	608.922.164,000,00	540.701.442.539,50	68.220.721.460,50	88,80
5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	7.226.822,000,00	5.399.275.933,00	1.827.546.067,00	74,71
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	27.482.348,000,00	18.076.792.504,00	9.405.555.496,00	65,78
5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	9.940.781,000,00	7.291.810.988,00	2.648.970.012,00	73,35
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	1.826.403,000,00	1.504.442.932,00	321.960.068,00	82,37
5978	Penyusunan dan Penyelidikan Kebijakan, Penelitian serta Pengelolaan Teknologi Informasi	36.987.104,000,00	33.890.190.882,81	3.096.913.117,19	91,63
5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	7.299.410,000,00	5.843.662.181,00	1.455.747.819,00	80,06
5980	Pelayanan Pemasaran, Kesehatan dan Protokol	27.361.932,000,00	23.080.075.440,00	4.281.856.560,00	84,35
JUMLAH		2.450.075.127,000,00	2.029.179.073.622,10	420.896.053.377,90	82,82

Batam, Desember 2021
Kepala Biro Keuangan



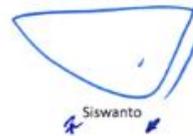
Siswanto

DATA PENERIMAAN SEMESTER 2 (PERIODE JULI s/d DESEMBER) 2021

Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja	Penerimaan		
		TA 2021		
		Target	Realisasi (Juli s/d Desember 2021)	Persentase
Realisasi Jumlah PNB	A. PENDAPATAN DARI PENGELOLAAN KAWASAN	509,958,386,000.00	245,639,245,176.49	48.17%
	1. Dir. Pengelolaan Pertanahan	464,155,700,000.00	230,353,178,696.00	49.63%
	2. Dir. Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	1,257,738,000.00	638,660,000.00	50.78%
	3. Biro Keuangan	42,675,544,000.00	13,658,205,056.49	32.00%
	4. Direktorat Infrastruktur Kawasan	1,869,404,000.00	989,201,424.00	52.92%
	B. PENDAPATAN DARI PENGUSAHAAN LAINNYA	1,160,241,614,000.00	517,134,186,513.96	44.57%
	1. Badan Usaha Pelabuhan	495,895,630,000.00	159,402,477,128.51	32.14%
	2. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	223,640,805,000.00	56,997,241,837.74	25.49%
	3. Badan Usaha Rumah Sakit	150,000,000,000.00	140,350,104,506.00	93.57%
	4. Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	289,439,169,000.00	160,244,931,372.71	55.36%
	5. Kantor Perwakilan	1,266,010,000.00	139,431,669.00	11.01%
	6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum			
	Total	1,670,200,000,000.00	762,773,431,690.45	45.67%

Batam,

Kepala Biro Keuangan



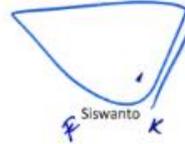
Siswanto

DATA PENERIMAAN TAHUN 2021 (PERIODE JANUARI s/d DESEMBER) 2021

Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja	Penerimaan		
		TA 2021		
		Target	Realisasi (Januari s/d Desember 2021)	Persentase
Realisasi Jumlah PNPB	A. PENDAPATAN DARI PENGELOLAAN KAWASAN	509,958,386,000.00	499,851,568,340.88	98.02%
	1. Dir. Pengelolaan Pertanahan	464,155,700,000.00	470,776,947,458.00	101.43%
	2. Dir. Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	1,257,738,000.00	1,226,830,000.00	97.54%
	3. Biro Keuangan	42,675,544,000.00	26,268,949,458.88	61.56%
	4. Direktorat Infrastruktur Kawasan	1,869,404,000.00	1,578,841,424.00	84.46%
	B. PENDAPATAN DARI PENGUSAHAAN LAINNYA	1,160,241,614,000.00	923,226,123,467.85	79.57%
	1. Badan Usaha Pelabuhan	495,895,630,000.00	317,233,724,226.29	63.97%
	2. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	223,640,805,000.00	128,076,256,524.52	57.27%
	3. Badan Usaha Rumah Sakit	150,000,000,000.00	218,269,483,737.17	145.51%
	4. Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	289,439,169,000.00	259,402,321,599.87	89.62%
	5. Kantor Perwakilan	1,266,010,000.00	244,337,380.00	19.30%
	6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum			
	Total	1,670,200,000,000.00	1,423,077,691,808.73	85.20%

Batam,

Kepala Biro Keuangan



Data Dukung Dari Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Realisasi Investasi Tahun 2021

PERHITUNGAN REALISASI INVESTASI							
FORMAT DARI BKPM (WA)							
STATUS PM	REALISASI INVESTASI					TARGET	PERSENTASE (%)
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		
PMA	2.503.642.000.000	1.241.238.000.000	2.641.524.000.000	974.479.920.000	7.360.883.920.000	10.950.000.000.000	67,22
PMDN	1.774.279.000.000	2.305.323.000.000	714.141.000.000	2.726.167.400.000	7.519.910.400.000	14.050.000.000.000	53,52
					14.880.794.320.000	25.000.000.000.000	59,52
FORMAT NSWI BKPM							
STATUS PM	REALISASI INVESTASI						
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		
PMA	2.503.641.580.000	1.241.237.980.000	2.641.523.980.000	974.479.920.000	7.360.883.460.000		
PMDN	1.774.278.800.000	2.305.322.900.000	714.141.200.000	2.726.167.400.000	7.519.910.300.000		

KONTRA KINERJA BP BATAM TAHUN 2021




**KONTRAK KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TAHUN 2021**

Nomor : PRJ-228/PB/2021
Nomor: 8/SPJ/KA/3/2021

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Andin Hadiyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Muhammad Rudi
Jabatan : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

- PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Investasi pada Kawasan Pengusahaan	Realisasi Investasi di Batam	Rp. 25 Triliun
2.	Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNB	Rp. 1,67 Triliun
3.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%
4.	Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	≥ 85,00 (skala 1-100) (Predikat Baik)
5.	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Terwujudnya pelayanan yang Bebas dari Korupsi	Predikat WBK 2 (dua) Unit Kerja
6.	Kinerja Pelayanan Perijinan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan	100%
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang	100%
7.	Inovasi Pelayanan	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan	100%
- PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
- PIHAK PERTAMA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

PIHAK PERTAMA,



Andin Hadiyanto

Jakarta, Januari 2021

PIHAK KEDUA,




Muhammad Rudi

Lampiran
Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan RI dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2021

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Realisasi Investasi di Batam

Sasaran Strategis	:	Investasi pada Kawasan Pengusahaan																												
Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi Investasi di Batam																												
Deskripsi	:	Realisasi investasi di Batam adalah jumlah total investasi luar negeri (PMA) dan investasi dalam negeri (PMDN) di wilayah Batam.																												
Formula	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Investasi</th> <th>Jumlah Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investasi Luar Negeri</td> <td>US \$750 Juta</td> </tr> <tr> <td>Investasi Dalam Negeri</td> <td>Rp. 14 Triliun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai tukar untuk konversi investasi luar negeri menggunakan asumsi makro pada APBN 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Realisasi Investasi</th> <th>Konversi Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122,51% - 150%</td> <td>Capaian riil</td> </tr> <tr> <td>117,51% - 122,5%</td> <td>120%</td> </tr> <tr> <td>112,51% - 117,5%</td> <td>115%</td> </tr> <tr> <td>107,51% - 112,5%</td> <td>110%</td> </tr> <tr> <td>102,51% - 107,5%</td> <td>105%</td> </tr> <tr> <td>97,51% - 102,5%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>92,51% - 97,5%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>87,51% - 92,5%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>82,51% - 87,5%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>77,51%-82,5%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	Investasi	Jumlah Investasi	Investasi Luar Negeri	US \$750 Juta	Investasi Dalam Negeri	Rp. 14 Triliun	Realisasi Investasi	Konversi Capaian	122,51% - 150%	Capaian riil	117,51% - 122,5%	120%	112,51% - 117,5%	115%	107,51% - 112,5%	110%	102,51% - 107,5%	105%	97,51% - 102,5%	100%	92,51% - 97,5%	95%	87,51% - 92,5%	90%	82,51% - 87,5%	85%	77,51%-82,5%	80%
		Investasi	Jumlah Investasi																											
		Investasi Luar Negeri	US \$750 Juta																											
		Investasi Dalam Negeri	Rp. 14 Triliun																											
		Realisasi Investasi	Konversi Capaian																											
		122,51% - 150%	Capaian riil																											
		117,51% - 122,5%	120%																											
		112,51% - 117,5%	115%																											
		107,51% - 112,5%	110%																											
		102,51% - 107,5%	105%																											
97,51% - 102,5%	100%																													
92,51% - 97,5%	95%																													
87,51% - 92,5%	90%																													
82,51% - 87,5%	85%																													
77,51%-82,5%	80%																													
Tujuan	:	IKU ini bertujuan sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.																												
Satuan Pengukuran	:	Rp.																												
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known																												
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)																												
Periode Pelaporan	:	Quartal/tahunan																												
Sumber Data	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal & Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Batam.																												

2. Realisasi Jumlah PNBP

Sasaran Strategis	:	Kinerja Pendapatan		
Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi Jumlah PNBP		
Deskripsi	:	Realisasi jumlah PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN.		
Formula	:	No	Kegiatan	Jumlah
		1	Pendapatan dari Pengelolaan Kawasan	Rp.509 Miliar
		2	Pendapatan dari Pengusahaan Lainnya	Rp.1,16 Triliun
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber pendapatan BLU.		
Satuan Pengukuran	:	Rp		
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>		
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)		
Periode Pelaporan	:	Quartal/tahunan		
Sumber Data	:	Laporan Keuangan		

3. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	: Pengembangan Sistem Informasi BLU																														
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU																														
Deskripsi	: Modernisasi pengelolaan BLU di sini adalah usaha atau proses pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLU baik dalam aspek keuangan maupun aspek layanan sesuai dengan tuntutan masa kini.																														
Formula	: Modernisasi pengelolaan BLU dihitung dari jumlah persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi BLU pada Tahun 2021 berdasarkan optimalisasi pengelolaan data pada aplikasi BIOS dan kelengkapan tahapan yang diselesaikan. <p style="text-align: center;">Formula:</p> <p style="text-align: center;">Capaian IKU = Jumlah Persentase Capaian Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU</p> <p>Pencapaian kelengkapan berdasarkan urutan tahapan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 75%;">Variabel</th> <th style="width: 20%;">Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Operasional Aplikasi BIOS</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ketersediaan website yang representatif</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ketersediaan database terpusat</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ketersediaan dashboard internal dan eksternal</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ketersediaan webservices untuk transfer data keuangan dan kepelabuhanan ke Kementerian Keuangan</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem IT</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total Skor</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>	No	Variabel	Nilai (%)	1	Operasional Aplikasi BIOS	20	2	Ketersediaan website yang representatif	10	3	Ketersediaan database terpusat	15	4	Ketersediaan dashboard internal dan eksternal	10	5	Ketersediaan webservices untuk transfer data keuangan dan kepelabuhanan ke Kementerian Keuangan	35	6	Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem IT	10	7	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10	8	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15	Total Skor		125
No	Variabel	Nilai (%)																													
1	Operasional Aplikasi BIOS	20																													
2	Ketersediaan website yang representatif	10																													
3	Ketersediaan database terpusat	15																													
4	Ketersediaan dashboard internal dan eksternal	10																													
5	Ketersediaan webservices untuk transfer data keuangan dan kepelabuhanan ke Kementerian Keuangan	35																													
6	Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem IT	10																													
7	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10																													
8	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15																													
Total Skor		125																													
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan serta peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.																														
Satuan Pengukuran	: %																														
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i> .																														
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																														
Periode Pelaporan	: Triwulanan/Tahunan																														
Sumber Data	: 1. Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan 2. Data primer sebagai pembanding/penguji kevalidan data yang terekam pada sistem																														

4. Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	: Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BP Batam			
Indikator Kinerja Utama	: Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			
Deskripsi	Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.			
Formula	Indeks Kuantitatif		Kualitatif	
	Skala 1-4	Skala 1-100	Predikat	Predikat
	3,5324 - 4,0	88,31 – 100,00	Sangat Baik	A
	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	Baik	B
	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	Kurang Baik	C
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	Tidak Baik	D	
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.			
Satuan Pengukuran	: Indeks			
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d. Desember)			
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)			
Periode Pelaporan	: Tahunan			
Sumber Data	: Hasil Survei			

5. Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi

Sasaran Strategis	:	Pelayanan BP Batam yang bebas dari Korupsi			
Indikator Kinerja Utama	:	Terwujudnya Pelayanan yang Bebas dari Korupsi			
Deskripsi	:	Penetapan Unit Kerja dalam memperoleh predikat WBK sehingga kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat menjadi lebih baik.			
Formula	:	No	Komponen	Target	Bobot
		1	Pembentukan Tim Penilai Intern.	100%	10%
		2	Terselesainya dokumen Zona Integritas oleh 2 (dua) Unit yang diusulkan	100%	40%
		3	Pengajuan Usulan WBK 2 Unit Kerja ke Kemenpan RB.	100%	20%
		4	Penilaian WBK oleh Kemenpan RB.	100%	20%
		5	Perolehan Predikat WBK.	100%	10%
<p><u>Perhitungan Capaian:</u></p> $\text{Capaian Komponen} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$ <p>Total Capaian = Jumlah total capaian seluruh komponen</p> <p>(Permenpan No 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah).</p>					
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bebas dari korupsi.			
Satuan Pengukuran	:	Piagam penghargaan dari Kemenpan-RB RI			
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)			
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Sumber Data	:	Biro SDM dan Organisasi, Pusat Harmonisasi Kebijakan & Satuan Pemeriksa Intern			

6. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan

Sasaran Strategis	:	Kinerja Pelayanan Perijinan
Indikator Kinerja Utama	:	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Lahan
Deskripsi	:	Dalam rangka memproses perijinan secara tertib dan tepat waktu telah ditetapkan waktu penyelesaian perijinan lahan yaitu Perka BP Batam nomor 18 Tahun 2020 dengan waktu penyelesaian adalah 28 hari.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Perijinan Lahan Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pemohon}} \times 100\%$
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memberikan jaminan penyelesaian perijinan yang tepat waktu.
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d. Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Direktorat Pengelolaan Lahan

7. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang

Sasaran Strategis	:	Kinerja Pelayanan Perijinan
Indikator Kinerja Utama	:	Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang
Deskripsi	:	Dalam rangka memproses perijinan secara tertib dan tepat waktu telah ditetapkan waktu penyelesaian perijinan Pemasukan barang yaitu SOP Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal : <ol style="list-style-type: none"> Nomor 05/SOP/BP-BATAM/DIT.LALIN PM/INDUSTRI/2020 Tentang Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari LDP dengan waktu penyelesaian adalah 1 hari; Nomor 07/SOP/BP-BATAM/DIT.LALINPM/INDUSTRI/2020 Tentang Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung dengan waktu penyelesaian adalah 1 hari.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Perijinan Pemasukan Barang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pemohon}} \times 100\%$
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memberikan jaminan penyelesaian perijinan yang tepat waktu.
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal

8. Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Lingkungan

Sasaran Strategis	: Inovasi Pelayanan																
Indikator Kinerja Utama	: Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Lingkungan																
Deskripsi	: Inovasi Pelayanan adalah kegiatan mewujudkan tujuan wisata yang berpihak pada pendidikan, usaha mikro kecil menengah dan lingkungan di Batam.																
Formula	: <table border="1" data-bbox="657 495 1337 633"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi Wisata</th> <th>Target</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Taman Rusa - Sekupang</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Taman Kolam - Sekupang</td> <td>100%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fisherism - Temiang</td> <td>100%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taman Rusa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya fasilitas kolam ikan, kolam pancing, kolam bermain anak (30%); • Terbangunnya area parkir (10%). <p>Taman Kolam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya fasilitas <i>jogging track</i> (45%). <p>Fisherism :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya pembuatan taman (5%); • Terbangunnya area <i>entrance</i> dan <i>promenade</i> (10%). 	No	Lokasi Wisata	Target	Bobot	1	Taman Rusa - Sekupang	100%	40%	2	Taman Kolam - Sekupang	100%	45%	3	Fisherism - Temiang	100%	15%
No	Lokasi Wisata	Target	Bobot														
1	Taman Rusa - Sekupang	100%	40%														
2	Taman Kolam - Sekupang	100%	45%														
3	Fisherism - Temiang	100%	15%														
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam.																
Satuan Pengukuran	: Jumlah																
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d. Desember)																
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																
Periode Pelaporan	: Semester/Tahunan																
Sumber Data	: Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan																